MODEL REKRUTMEN CALON LEGISLATIF BERBASIS KOMPETENSI LEGISLATIF

Penulis;

Muhammad Husni Thamrin Nasution

ELITA DEWI

Hatta Ridho

Rudi Salam Sinaga

LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK

MODEL REKRUTMEN CALON LEGISLATIF BERBASIS KOMPETENSI LEGISLATIF

Penulis

Muhammad Husni Thamrin

Elita Dewi

Hatta Ridho

Rudi Salam Sinaga

LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK

MODEL REKRUTMEN CALON LEGISLATIF BERBASIS KOMPETENSI LEGISLATIF

Penulis:

Muhammad Husni Thamrin Nasution

Elita Dewi

Hatta Ridho

Rudi Salam Sinaga

Diterbitkan oleh :

Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(LKISPOL)

Jl. Eka Prasetya No. 61

Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Indonesia. Kode Pos 20351

Email : lkispol_press@yahoo.co.id. web: lkispol.or.id

Penyunting: Rudi Salam Sinaga

Desain cover dan layout: Rudi Salam Sinaga

Cetakan Pertama November 2018

ISBN : 978-602-50762-1-3

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis
atau penerbit.

Isi buku diluar tanggung jawab penerbit.

1

DEMOKRASI DAN REKRUTMEN POLITIK

1. Demokrasi dan Kualitas Legislatif

Keberhasilan demokrasi di suatu negara terletak pada tercapainya dua aspek penting dalam tataran realisasi yakni aspek substansial (pemahaman filosofis demokrasi) dan aspek prosedural (penyelenggaraan demokrasi). Aspek substansial dapat dikatakan terwujud ketika setiap individu memiliki pemahaman kolektif mengenai konsep atau prinsip-prinsip dari demokrasi yang berlaku secara umum yang dapat diterima dengan nilai-nilai kearifan “lokal” (nasional) sementara aspek prosedural dapat dikatakan terealisasi ketika penerapan demokrasi telah teregulasi secara lengkap dengan berwawasan kedepan.

Kelak ketika kedua aspek tersebut telah terpenuhi dalam standard pemahaman kolektif maka demokrasi akan terus bergerak dinamis

menuju pada pemahaman baru yang menanti perhatian dan pemahaman kolektif yang baru pula dan begitu seterusnya hingga standard-standard baru dari kedua aspek tersebut berjalan secara terus menerus.

Output utama dari demokrasi ialah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, *output* lainnya ialah menjamin terkontrolnya setiap sistem dalam lingkup lembaga negara menuju hakekat peran *institusional* masing-masing. Bila ditinjau secara universal maka sesungguhnya *output* demokrasi dalam berbagai segmentasinya amat bergantung dari seberapa tangguh aktor-aktor politik dapat mendayagunakan demokrasi hingga kerap melahirkan *output-output* berarti bagi pemaksimalan pengelolaan negara yang berpihak pada kolektifitas publik (rakyat).

Demokrasi sebagai suatu konsep yang dipandang sebagai alat "*tools*" untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang berlangsung dibawah pengaruh otoritarian. Dengan penekanan teraplikasinya berbagai prinsip yang melekat dalam konsep demokrasi maka diharapkan tujuan negara dalam menggapai kehidupan tata kelola kenegaraan akan semakin lebih baik karena mengedepankan pada kehendak kolektifitas publik.

Demokrasi tidak akan mampu teraplikasi secara benar ataupun cepat karena demokrasi itu sendiri memerlukan proses pendemokratisasian dimana suksesi demokratisasi amat bergantung dari kesungguhan elit aktor politik untuk membawa kearah mana kemajuan dari demokrasi itu akan di capai. Elit aktor politik yang mendekam dalam kekuatan politik (partai politik) yang termanifestasikan dalam struktur kekuasaan politik di Indonesia secara formal terpenetrasi kedalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Cikal Bakal Konsep Kekuasaan Legislatif: Teori Kontrak Sosial Thomas Hobbes (1588-1679)

Thomas Hobbes sebagai pemikir yang lahir di negara Inggris tahun 1588 pada usia muda sempat mengambil studi di Oxford University, pemikiran Hobbes dalam mempelajari manusia dan masyarakat banyak terinspirasi dari beberapa pemikir seperti Rene Descartes seorang pemikir dari Perancis yang memahami ilmu Geometri yang dapat membantu dalam membentuk model sistematis ideal dan pengetahuan mempengaruhi manusia. Pemikiran lainnya yang menginspirasi Hobbes ialah mengenai prinsip gerak alam semesta yang di gagas oleh Galileo Galilei sehingga akhirnya Hobbes berkeyakinan manusia merupakan alat mekanis namun manusia itu merupakan mesin-mesin yang berpikir (Syam, 2007:115-121).

Pemikiran Hobbes dalam hal kehidupan sosial politik mencetuskan teori kontrak sosial

dan wewenang yang melekat pada lembaga legislatif maka menjadi pertanda bahwa keberadaan lembaga legislatif beserta aktor politik di dalamnya berperan besar dalam menentukan arah kebijakan negara dan hal ini memengaruhi capaian peradaban sebuah negara. Capaian-capaian tersebut terartikulasi melalui beragam tindakan seperti apa yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang legislatif dan capaian kinerja tersebut amat bergantung dari kualitas anggota legislatif yang berada di dalam lembaga legislatif.

5. Konsep Rekrutmen Dalam Birokrasi dan Sistem Politik

5.1. Rekrutmen: Konsep Birokrasi Max Weber

Weber dikenal sebagai ahli sosiologi dan ekonomi politik yang berasal dari Jerman lahir tanggal 21 April 1864 di Erfurt-Jerman melahirkan berbagai gagasan salah satunya mengenai konsep birokrasi ideal. Gagasan Weber tentang birokrasi

2

REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DI GOLKAR DAN PDIP

1. Sejarah Ringkas Partai Golkar dan PDIP

Sejarah terbentuknya partai Golkar menurut Suryadinata (1992: 14-16) diawali dengan kelahiran “Sekretariat Bersama Golongan Karya”, Tokoh dominan yang memperakarsai terbentuknya “Sekretariat Bersama Golongan Karya” ialah Jenderal A.H. Nasution dan rekan-rekan di Tentara pada tahun 1964 di bulan Oktober. Kesuksesan “Sekretariat Bersama Golongan Karya” dalam menjalankan tujuannya tidak terlepas dari kiprah tiga organisasi yang menjadi pendukung utama terhadap berjalannya kiprah “Sekretariat Bersama Golongan Karya” yakni: 1) ABRI, 2) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), 3) Koperasi Simpan Tabung Gotong Royong (KOSGORO), dan

3

MODEL REKRUTMEN CALON LEGISLATIF BERBASIS KOMPETENSI LEGISLATIF

1. Pendahuluan

Demokrasi sebagai suatu konsep yang dipandang sebagai alat “*tools*” untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang berlangsung di bawah pengaruh otoritarian. Dengan penekanan teraplikasinya berbagai prinsip yang melekat dalam konsep demokrasi maka diharapkan tujuan negara dalam menggapai kehidupan tata kelola kenegaraan akan semakin lebih baik karena mengedepankan pada kehendak kolektifitas publik. Demokrasi tidak akan mampu teraplikasi secara benar ataupun cepat karena demokrasi itu sendiri memerlukan proses pendemokratisasian dimana suksesi demokratisasi amat bergantung dari kesungguhan elit aktor politik untuk membawa kearah mana kemajuan dari demokrasi itu akan dicapai.

4. Model Rekrutmen Caleg Berbasis Kompetensi Legislatif

Model rekrutmen legislatif berbasis kompetensi legislatif (Kedewanan) menyangkut tercapainya aspek prosedural rekrutmen di internal partai politik yang inklusif dan menitikberatkan perhatian pada kompetensi di bidang kedewanan dari calon legislatif sehingga berimplikasi pada aspek substansial bila telah terpilih menjadi legislatif dimana aspek substansial itu ialah tercapainya kinerja legislatif yang tergambar dari target tepenuhinya program legislasi daerah di tingkat provinsi.

Studi ini menggunakan teori model rekrutmen calon legislatif yang dikembangkan oleh Rahat dan Hazan (2001), meski terdapat model rekrutmen lainnya seperti model yang dikembangkan oleh Ashe dan Stewart (2012: 688-689), (Hazan & Voerman, 2006), (Rahat, 2007).

Gambar 4.1: Model Rekrutmen Calon Legislatif
Berbasis Kompetensi Legislatif

Gambar di atas memperlihatkan usulan untuk mendapatkan Caleg yang memahami fungsi dan kewenangan legislatif ditataran teoritis dan praktis melalui model rekrutmen Caleg berbasis kompetensi legislatif. Poin perhatian yang ditekankan pada gambar di atas ialah figur bakal Caleg (Bacaleg) dapat direkrut (dicari, dipersiapkan partai) atau mengajukan diri (mendaftar ke partai) kemudian partai memverifikasi (memeriksa) latar belakang pengetahuan Bacaleg berkaitan dengan kompetensi legislatif seperti dengan menggunakan indikator pengetahuan teori politik, legislasi, anggaran negara/daerah dan pengawasan.

Indikator ini setidaknya-tidaknya berguna untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Bacaleg dan selanjutnya tugas partai untuk memastikan figur Caleg yang telah ditetapkan dengan kompetensi seperti ini dapat memiliki peluang keterpilihan melalui dukungan

Gambar 4.1: Model Rekrutmen Calon Legislatif
Berbasis Kompetensi Legislatif

Gambar di atas memperlihatkan usulan untuk mendapatkan Caleg yang memahami fungsi dan kewenangan legislatif ditataran teoritis dan praktis melalui model rekrutmen Caleg berbasis kompetensi legislatif. Poin perhatian yang ditekankan pada gambar di atas ialah figur bakal Caleg (Bacaleg) dapat direkrut (dicari, dipersiapkan partai) atau mengajukan diri (mendaftar ke partai) kemudian partai memverifikasi (memeriksa) latar belakang pengetahuan Bacaleg berkaitan dengan kompetensi legislatif seperti dengan menggunakan indikator pengetahuan teori politik, legislasi, anggaran negara/daerah dan pengawasan.

Indikator ini setidaknya-tidaknya berguna untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Bacaleg dan selanjutnya tugas partai untuk memastikan figur Caleg yang telah ditetapkan dengan kompetensi seperti ini dapat memiliki peluang keterpilihan melalui dukungan

Politics, Groups, and Identities, 4(2), 179–195.
<http://doi.org/10.1080/21565503.2015.1120223>

Budi, A. (2013). Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1), 51–66.

Ceyhan, S. (2016). The Legislative Recruitment of Immigrant-Origin Candidates in Germany: Neutrality, Closure or Openness?, (April).

Chiva, C. (2014). Gender, European Integration and Candidate Recruitment: The European Parliament Elections in the New EU Member States. *Parliamentary Affairs*, 67(2), 458–494.

Czudnowski, M. M. (1970). Legislative Recruitment under Proportional Representation in Israel: A Model and a Case Study. *Midwest Journal of Political Science*, 14(2), 216–248.
<http://doi.org/10.2307/2110194>

Dirhamsyah, D. (2006). Indonesian legislative framework for coastal resources management: A critical review and recommendation. *Ocean and Coastal Management*.
<http://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2005.09.001>

Goodman, N. J. (2006). *Legislative Recruitment: An Analysis of the 38th Parliament. Annual Meeting of the Canadian Political Science Association.*

- Gregory, A. (1976). *Recruitment and Factional Patterns of The Indonesian Political Elite: Guided Democracy and The New Order*. Dissertation. Columbia University. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Xerox+University+Microfilms+300#5>
- Harjanto, N. T. B. (2010). *Political Party Survival: The Golongan Karya Party and Electoral Politics in Indonesia 1999-2009*. Disertation. Northern Illinois University. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/851699861?accountid=13771>
- Hazan, R. Y., & Voerman, G. (2006). Electoral Systems and Candidate Selection. *Acta*, 41, 146–162. <http://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500153>
- Ishiyama, J., & Marshall, M. (2015). Candidate Recruitment and Former Rebel Parties. *Party Politics*, 21(4), 591–602. <http://doi.org/10.1177/1354068813487125>
- Jones, M. P. (2008). The Recruitment and Selection of Legislative Candidates in Argentina. *Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, 41–75.
- Kadji, Y., Aneta, A., Ilato, R., Tahir, A., Kadji, M. A., Aneta, Y., ... Nurdin. (2011). *Analisis Kinerja Kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo*. Gorontalo.

- Langston, J. (2008). Legislative Recruitment in Mexico. *Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, 143–163.
- Lee, J. P. (1999). *Out of order: The politics of modernity in Indonesia*. University of Virginia.
- Mahadi, H. (2011). Pragmantisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 38–71.
<http://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0004>
- Masyarakat, L. S. dan A. M. (2009). *Penilaian Kinerja DPR dan Hak Asasi Manusia*.
- Matthews, D. R. (1984). Legislative Recruitment and Legislative Careers. *Legislative Studies Quarterly*, 9(4), 547–585. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/439635>
- Menes, J. R. (1997). *Modernization and Political Cleavages in Open Party System. Sources of Medium Run Instability in Non Consolidated Democracies: The Case of Spain. Dissertation*. Northwestern University.
- Michels, R. (1959). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Dover.
- Moncrief, G. F. (1999). Recruitment and Retention in U.

S. Legislatures. *Legislative Studies Quarterly*, 24(2), 173–208.

Mugge, L. M. (2016). Intersectionality, Recruitment and Selection: Ethnic Minority Candidates in Dutch Parties. *Parliamentary Affairs*, 69(3), 1–19. <http://doi.org/10.1093/pa/gsv060>

Murray, R. (2012). Parity and Legislative Competence in France. In S. Franceschet, M. L. Krook, & J. M. Piscopo (Eds.), *The Impact of Gender Quotas* (p. 27). New York: Cambridge University Press. <http://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199830091.003.0002>

Niranjan, V. (2016). Legislative Competence the Union and the States. In S. Choudhry, K. Madhav, & P. B. Mehta (Eds.), *The Oxford Handbook of the Indian Constitution* (p. 26). New York: Oxford University Press. <http://doi.org/10.1093/law/9780198704898.003.0026>

Norris, P. (1997). *Passages to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge University Press. <http://doi.org/10.1086/210170>

Norris, P. (2006). Recruitment. In R. S. Katz & W. Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications Ltd.

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political Recruitment:*

Gender, Race and Class in the British Parliament.
New York: Cambridge University Press.

Nurhaya, S. P. (2009). *Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009)*. Skripsi. Sumatera Utara.

Ostrogorski, M. (1902). *Democracy and the Organisation of Political Parties* (Vol. 1). London: Macmillan.

Peers, S. (2008). Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-Making in the Treaty of Lisbon. *European Journal of Migration and Law*, 10(2), 219-247.
<http://doi.org/10.1163/157181608X317354>

Protsyk, O., & Matichescu, M. L. (2011). Clientelism and Political Recruitment in Democratic Transition: Evidence from Romania. *Comparative Politics*, 43, 207-224.
<http://doi.org/10.5129/001041511793931807>

Protsyk, O., & Sachariew, K. (2012). Recruitment and representation of ethnic minorities under proportional representation: Evidence from Bulgaria. *East European Politics and Societies*, 26(2), 313-339.
<http://doi.org/10.1177/0888325410364672>

Rabasa, A., & Chalk, P. (2001). *Indonesia's Transformation and the Stability of Southeast Asia*. Santa Monica: RAND.
<http://doi.org/10.7249/mr1344af>